

PEMBAHASAN RUU HKPD

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penjelasan pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9). Raker itu membahas Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD).



IDN/ANTARA

Menkeu Dorong KEK Agar Berkontribusi pada Pemulihan Ekonomi Nasional

“Kawasan ekonomi khusus dirancang sebagai kawasan yang diharapkan memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Di dalam kawasan ini akan diberikan berbagai fasilitas dan insentif khusus. Ini untuk menarik investasi dan kegiatan produktif bahkan tentu juga orientasi ekspor,” kata Sri Mulyani.

JAKARTA (IM) - Negara hadir mewujudkan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui percepatan pembangunan ekonomi yang merata, kemudahan investasi guna peningkatan penanaman modal, simplifikasi proses untuk memperoleh fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang luar biasa dalam perekonomian. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia selalu mampu memanfaatkan kondisi krisis sebagai kesempatan untuk membangun pondasi yang semakin kokoh dengan memperkuat reformasi struktural.

“Reformasi struktural yang kita lakukan pada masa

menghadapi Covid ini antara lain yang sangat penting dan strategis adalah terselesaikannya dan akan dilaksanakan amannya Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengamanatkan hal yang penting yaitu deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Bagaimana pemerintah harus terus memangkas birokrasi dari pusat hingga ke daerah,” kata Sri Mulyani dalam acara Webinar Kawasan Ekonomi Khusus secara daring pada Senin (13/9), seperti dilansir dari laman Kemenkeu.

Menurut Sri Mulyani, salah satu yang diatur di dalam Undang-undang Cipta Kerja adalah dibentuknya KEK dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini disebut Menkeu ditujukan untuk tujuan produktif dan investasi.

“Kawasan ekonomi khusus dirancang sebagai kawasan

yang diharapkan memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Di dalam kawasan ini akan diberikan berbagai fasilitas dan insentif khusus. Ini untuk menarik investasi dan kegiatan produktif bahkan tentu juga orientasi ekspor,” lanjut Sri Mulyani.

Sasaran pengembangan KEK adalah untuk meningkatkan kehadiran modal baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan kehadiran modal ini, menurut Menkeu akan muncul kegiatan industri yang makin produktif atau optimal, serta industri yang makin kompetitif bahkan meningkatkan ekspor. Menkeu berujar KEK dengan berbagai kekhudusan dan insentif akan diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

Ia berharap akan muncul terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di

Indonesia yang memanfaatkan fasilitas KEK ini. Untuk mencapai sasaran tersebut, Menkeu mengatakan ada dua hal penting dari perubahan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus yang sekarang ada di dalam Undang-undang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021.

Pertama, Peraturan Pemerintah ini diberikan kepastian fiskal kepada para pelaku usaha dan investor. Kedua, dilakukan penerapan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.

Dengan demikian pelaksanaan dari kegiatan ekonomi di kawasan ekonomi khusus terutama ekspor dan impor akan semakin efisien, produktif, kompetitif, dan lebih pasti.

“Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja dan dilakukannya penguatan berbagai fasilitas dan penguatan ke-

mudahan prosedur layanan juga pengawasan akan memberikan kawasan ekonomi khusus dukungan operasional pelayanan maupun pengawasan yang makin baik. Saya berharap kawasan ekonomi khusus ini dengan berbagai fasilitas dan insentif yang diberikan akan benar-benar mampu menarik investor untuk bisa menanamkan modal di kawasan ekonomi khusus, baik itu adalah investor dalam negeri maupun investor yang berasal dari global,”ujarnya.

Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, peningkatan penanaman modal akan sangat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan kesempatan kerja yang sangat dibutuhkan. Dan penciptaan kesempatan kerja tersebut diharapkan adalah lapangan kerja yang memiliki produktivitas dan kualitas yang baik. • dot

Pertamina NRE Tancap Gas Kawal Transisi Energi

JAKARTA (IM) - Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) atau Pertamina NRE telah resmi terbentuk secara hukum pada awal Agustus 2021 lalu. Pembentukan subholding dinilai akan mengawal langkah transisi energi Indonesia dalam mewujudkan energi bersih melalui pengembangan energi terbarukan.

“Pembentukan holding dan subholding di tubuh Pertamina bertujuan agar Pertamina lebih adaptif terhadap lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Aspirasi Kementerian BUMN RI selaku pemegang saham salah satunya adalah Pertamina menjadi pemimpin transisi energi di Indonesia untuk menekan laju perubahan iklim, melalui industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. “Hal ini juga untuk mendukung pemulihan ekonomi global akibat pandemi,” ujar Febri.

Ketersediaan bahan baku yang melimpah merupakan *comparative advantage* bagi industri Tanah Air. Selain itu juga didukung dengan kemudahan iklim berusaha Pemerintah melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. “Hal ini diharapkan dapat mewujudkan industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan,” sebut Febri.

Kolaborasi kekayaan alam dan keunggulan SDM dapat dilihat dari beberapa sektor yang memiliki kinerja menonjol, misalnya industri pengolahan kayu dan furnitur. Secara keseluruhan, perkembangan permintaan global produk industri furnitur dan *woodworking* sangat menjanjikan. Ekspor produk furnitur (HS 9401-9403) di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan nilai USD1,91 miliar, meningkat 7.6% dari tahun 2019 yaitu senilai USD1.77 miliar. • dro

tama, meningkatnya peluang untuk menjalin kemitraan dalam rangka untuk mempercepat pengembangan kapabilitas BUMN di bisnis energi baru dan terbarukan. Kedua, memperoleh fleksibilitas dalam mencari alternatif pendanaan yang kompetitif seperti Green Financing, Green Bond, termasuk melakukan unlock value perusahaan melalui skema initial public offering (IPO).

Ketiga, percepatan pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan Pertamina dengan penajakan kepada bisnis hydrogen, ekosistem kendaraan listrik, dan bisnis lainnya. Keempat, adanya potensi sinergi pemanfaatan talent yang telah berpengalaman dalam pengembangan proyek dan program pemeliharaan pembangkit listrik geothermal pada pembangkit listrik lainnya di subholding PNRE.

Di sisi lain, untuk mencapai target 17% energi bersih dalam portofolio bisnis Pertamina, subholding

PNRE memiliki aspirasi untuk mencapai kapasitas 10 GW energi bersih pada tahun 2026, yang terdiri dari 6 GW gas to power, 3 GW energi terbarukan di mana termasuk panas bumi di dalamnya, serta 1 GW energi baru.

Dannif menambahkan bahwa subholding PNRE berkomitmen penuh mendukung target Pertamina menurunkan emisi karbon sebesar 30 persen pada tahun 2030 dengan mengedepankan aspek environment, social, and governance (ESG) dalam praktik bisnisnya.

“Dengan transformasi ini, subholding PNRE menjadi lebih fokus dengan amanah mengawal transisi energi, mewujudkan visi sebagai Indonesia Green Energy Champion, mencapai aspirasi kapasitas terpasang sebesar 10 GW pada tahun 2026, serta mendukung visi Pertamina menuju global green energy company,” tutup Dannif. • hen

Indonesia Fokus Tingkatkan Nilai Tambah Manufaktur

JAKARTA (IM) - Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara terus meningkatkan nilai tambah manufaktur atau *manufacturing value added (MVA)* untuk basis produksi manufaktur terbesar di wilayah tersebut. Dengan MVA mencapai USD281 miliar yang unggul dibanding negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia telah mampu menggeser ekonominya menjadi *manufactured based*.

“Berbagai langkah dilakukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk meningkatkan nilai tambah di sektor industri, antara lain mendorong hilirisasi, substitusi impor, dan menjadikan industri di Tanah Air sebagai bagian rantai pasok global,” ujar Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, seperti dilansir dari laman Kemenperin, Senin (13/9).

Peningkatan nilai tambah industri dapat menciptakan *multiplier effect*, antara lain penyerapan tenaga kerja, devisa ekspor, serta meningkatkan kontribusi terhadap pajak dan cukai. Apalagi Indonesia dikenal memiliki keunggulan komparatif, yakni sumber daya alam (SDA) yang cukup tersedia, juga potensi sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang terampil, sehingga mampu meningkatkan daya saing produksi dalam negeri.

“Keuatan ekonomi Indonesia terletak pada pasar domestik yang besar, dengan tetap berorientasi ekspor. Ini yang membedakan dengan negara lain di ASEAN, seperti Singapura atau Vietnam,” ujar Febri.

Dengan skala ekonomi yang lebih besar, serta jenis industri yang lebih beragam, MVA Indonesia lebih ung-

gul dibanding negara ASEAN lainnya, seperti Thailand (USD1,23 miliar), Malaysia (USD81,19 juta), atau Vietnam (USD41,7 juta).

“Apalagi, di antara negara-negara di ASEAN, Indonesia merupakan satu-satunya yang masuk dalam G20. Ini menandakan Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia,” kata Febri.

Pada 2022, Indonesia akan menjadi Presiden G20 sekaligus tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dalam presidensi G20 tahun 2022, isu prioritas bidang industri yang diangkat adalah akselerasi industri 4.0 untuk industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. “Hal ini juga untuk mendukung pemulihan ekonomi global akibat pandemi,” ujar Febri.

Ketersediaan bahan baku yang melimpah merupakan *comparative advantage* bagi industri Tanah Air. Selain itu juga didukung dengan kemudahan iklim berusaha Pemerintah melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. “Hal ini diharapkan dapat mewujudkan industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan,” sebut Febri.

Kolaborasi kekayaan alam dan keunggulan SDM dapat dilihat dari beberapa sektor yang memiliki kinerja menonjol, misalnya industri pengolahan kayu dan furnitur.

Secara keseluruhan, perkembangan permintaan global produk industri furnitur dan *woodworking* sangat menjanjikan. Ekspor produk furnitur (HS 9401-9403) di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan nilai USD1,91 miliar, meningkat 7.6% dari tahun 2019 yaitu senilai USD1.77 miliar. • dro



IDN/ANTARA

PERAJIN TENUN TRADISIONAL DUSUN SADE LOMBOK

Perajin menyelesaikan pembuatan kain tenun tradisional Sasak di Dusun Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (13/9). Para perajin tenun di daerah tersebut setiap harinya beraktivitas membuat kain tenun tradisional Sasak yang dijual untuk wisatawan yang berkunjung mulai harga Rp250 ribu hingga Rp1 juta tergantung jenis dan ukuran kain.



PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

SU 01019
TELEPON KELUAR NEGERI LANGSUNG DARI PONSEL

Wappon Hemat Ke Luar Negeri!
Suara Jernih ngobrol pun nyaman

Cuma Rp 6 an-/detik*

Tekan Kode Akses 01019
TELKOMSEL dan XL

01019 Kode negara Kode area No Telepon yang dituju OK/Yes

Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxx

https://www.facebook.com/GaharuTelecom https://www.twitter.com/GaharuTelecom

* Khusus untuk negara China, USA, Canada, Hong Kong, Singapore: tarif Rp 6 an-/detik dengan menggunakan GSM Telkomsel
* Tarif belum termasuk PPN & pembuatan per 6 detik

INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI
Customer Service : 021-634 5009
Mobile : 0811 17 50 291-95
SMS : 0811 17 50 369
E-mail : support@gaharu.co.id

GAHARU
TELECOM
www.gaharu.co.id

MIND ID Catat Laba Bersih Rp4,7 Triliun

JAKARTA (IM) - BUMN Holding Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID), merealisasikan kinerja produksi dan keuangan yang positif sepanjang semester I-2021. Laba bersih pun mencapai Rp4,7 triliun, naik signifikan dibandingkan posisi rugi bersih Rp1,8 triliun pada periode awal tahun 2020.

CEO Grup MIND ID, Orian Petrus Moedak menegaskan, capaian ini ditopang oleh kinerja produksi dan penjualan grup MIND ID yang optimal, implementasi strategi keuangan dalam menjaga tingkat likuiditas, serta membaiknya harga komoditas global.

“Pada semester I-2021, MIND ID mencatat kinerja operasional dan keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Sebagai *strategic holding*, kami menerapkan strategi keuangan khususnya dalam menjaga tingkat likuiditas, termasuk untuk memenuhi kewajiban finansial yang ada untuk memonitor dan menjaga

tingkat produksi dan penjualan, serta mendorong sinergi di antara anggota MIND ID,” ujar Orian dalam keterangan tertulis, Senin (13/9).

Holding yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk ini, memastikan bahwa pada awal 2021, kegiatan operasional anggota MIND ID dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga aktivitas produksi dan penjualan dapat berjalan optimal.

Ia mengatakan, seiring dengan adanya pemulihan perekonomian dunia serta didorong oleh permintaan komoditas yang cukup tinggi, MIND ID mencatat pendapatan Rp39,2 triliun atau meningkat 34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp29,3 triliun. Hal ini menunjukkan profitabilitas yang positif ditunjukkan dengan capaian Earnings Before Interest. • pan

Holding Ultra Mikro Resmi Dibentuk, Pemerintah Alihkan Saham Rp54,7 Triliun

JAKARTA (IM) - Proses pembentukan Holding Ultra Mikro (UMI) telah memasuki tahap akhir. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham yang diselenggarakan pada Senin (13/9).

Pembentukan holding ini melibatkan tiga entitas BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia selaku induk holding, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Nilai pengalihan saham negara kepada BRI senilai Rp54,7 triliun. Pengalihan saham tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Keputusan Menteri Keuangan pada 16 Juli 2021 perihal Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Modal Saham BRI.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara yang turut hadir dalam acara tersebut meyakini bahwa pada masa yang akan datang, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menjadi salah satu sektor dunia usaha yang memegang peranan luar biasa penting di dalam pemulihan ekonomi.

“Kalu pemulihan ekonomi kita didorong oleh usaha mikro, membuat yang mikro menjadi formal, menaruh dia di dalam konteks perbankan, memberikan dia pemberdayaan, maka naik kelasnya akan bisa lebih cepat,” kata Suahasil, dilansir dari laman Kemenkeu, Senin (13/9).

Maka dari itu, ia menjelaskan perlu untuk melihat secara reguler bagaimana perkembangan dari usaha kecil dan usaha mikro yang mendapatkan pelayanan. Hal tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo agar porsi pendanaan untuk kredit UMKM pada tahun 2024 adalah sedikitnya 30%. • hen